



**KEWENANGAN KREDITOR ATAS DEBITOR PAILIT AKIBAT
INSOLVEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU**

TESIS

SULISTIYONO

1320922044

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2016**



**KEWENANGAN KREDITOR ATAS DEBITOR PAILIT AKIBAT
INSOLVEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

SULISTIYONO

1320922044

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2016**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan secara benar.

Nama : Sulistiyono
NRP : 1320922044
Tanggal : 19 Desember 2015

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 19 Desember 2015

Yang Menyatakan,


Sulistiyono

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulistiyono
NRP : 1320922044
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Kewenangan Kreditor Atas Debitor Pailit Akibat Insolven Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Desember 2015

Yang menyatakan,



Sulistiyono

PENGESAHAN

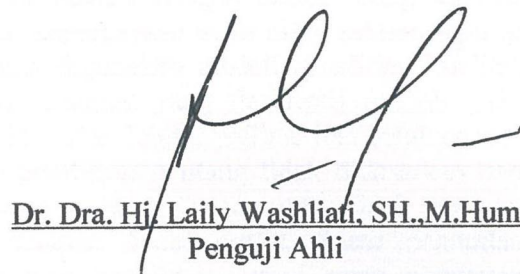
Tesis diajukan oleh :

Nama : Sulistiyono
NRP : 1320922044
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Kewenangan Kreditor Atas Debitor Pailit Akibat Insolven
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan PKPU

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.



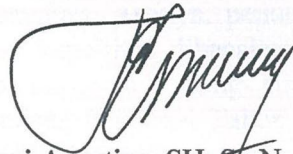
Dr. Arrisman, SH.,MH
Ketua Penguji



Dr. Dra. Hj. Laily Washliati, SH.,M.Hum
Penguji Ahli



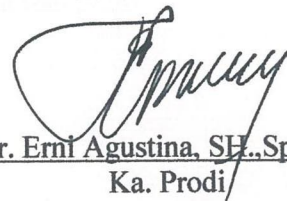
Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH.,MH
Penguji I



Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N
Penguji II (Pembimbing)



Dr. Iwan Kresna Setiadi, SE.,MM
Direktur



Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 19 Desember 2015

KEWENANGAN KREDITOR ATAS DEBITOR PAILIT AKIBAT INSOLVEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Sulistiyono

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan debitor dalam perikatan pada umumnya dengan debitor dalam perikatan utang-piutang dan untuk mengetahui bagaimana insolven pada perseroan terbatas sebagai dasar permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dikemukakan bahwa dalam kerangka teoritis tiga elemen atau aspek dari sistem hukum, yaitu: *structure*, *substance* dan *legal culture*. *Structure* adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga peradilan dan lembaga legislatif), sedangkan *substance* yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan, *legal culture* adalah sebagai sikap, orang terhadap hukum dan sistem hukum yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif hingga menghasilkan kesimpulan berbentuk kalimat yang deskriptif analitis yakni menjelaskan dan mengenai kewenangan kreditor atas debitor pailit akibat insolven.

Hasil penelitian ini dirumuskan penundaan pembayaran utang tidak didasarkan pada keadaan dimana debitor tidak mampu membayar utang (*insolven*) dan tidak bertujuan untuk dilakukannya suatu pemberesan (*likuidasi budel pailit*). Suatu penundaan pembayaran dapat berubah menjadi pernyataan kepailitan, tetapi suatu pernyataan kepailitan tidak dapat berubah menjadi penundaan pembayaran. Artinya, penundaan pembayaran utang hanya dapat diberikan sebelum putusan kepailitan dibacakan oleh Pengadilan Niaga. Perlindungan hukum terhadap debitor berdasarkan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak berbeda dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998 yaitu melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun tergantung kepada rapat kreditor apakah akan menerima atau menolak permohonan perdamaian yang diajukan oleh debitor. Selain itu Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga belum mensyaratkan adanya insolvensi test dalam persyaratan pailit.

Kata Kunci : penundaan pembayaran utang.

AUTHORITY DUE TO CREDITORS OF THE BANKRUPTCY DEBTOR INSOLVENT BY LAW NUMBER 37 OF 2004 ON BANKRUPTCY AND PKPU

Sulistiyono

Abstractt

This study was conducted to determine the position of the debtor in engagement generally with debtors in engagement debts and to find out how the limited liability company as insolvent on the basis of a request postponement of debt payment obligations (PKPU). The theory used in this study is the legal system is the theory put forward by Lawrence M. Friedman argued that the theoretical framework of the three elements or aspects of the legal system. namely: structure, substance and legal culture. Structure is concerned lembaga-agency authorized to make and implement the law (the judiciary and the legislature), while substance ie, matter or form of the legislation, legal culture is as attitudes, those against the law and the legal system which involves belief values, thoughts or ideas and their hopes. The method used is qualitative research to produce conclusions to form a sentence that describes the analytical description and the authority of the creditors on the debtor bankrupt due to insolvency. The results of this study defined delay debt payments are not based on the circumstances in which the debtor is unable to pay the debt (insolvent) and is not intended to do a settlement (liquidation Budel bankruptcy). A delay in payment can be transformed into bankruptcy statement, but a statement of bankruptcy can not be turned into a deferred payment. That is, the delay of debt payments can only be given before the verdict was read out by the Commercial Court bankruptcy. Legal protection of the debtor by Law No. 37 of 2004 do not differ by Law No. 4 of 1998, namely through the Suspension of Payment (PKPU). However, depending on the creditors meeting whether to accept or reject the application filed by the debtor peace. In addition to Law Number 37 Year 2004 also requires the insolvency test yet in terms of bankruptcy.

Keywords: delay in payment of debts.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah S.W.T karena berkat rahmat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kekeliruan, hal ini karena keterbatasan kemampuan penulis dalam pengumpulan data maupun dari segi bahasa dan penyusunannya; oleh karena itu, segala kritik dan saran akan penulis terima dengan senang hati.

Selama penyusunan tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan berharga dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Iwan Kresna Setiadi, SE.,MM selaku Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N, sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Ibu Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH.,MH selaku Pembimbing I
4. Ibu Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N selaku Pembimbing II
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengajaran kepada kami.
6. Istri dan anak-anak tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan perhatian yang lebih selama mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dalam penulisan tesis ini mendapat balasan dari Allah SWT dan harapan penulis mudah-mudahan karya ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 19 Desember 2015

Penulis



Sulistiyono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
I.1 Latar Belakang Masalah.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	12
I.3 Tujuan Penelitian.....	12
I.4 Manfaat Penelitian.....	12
I.5 Kerangka Teori dan Konseptual.....	13
I.6 Sistematika Penulisan.....	16
 BAB II TINJAUAN UMUM.....	 18
II.1 Pembaruan Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia.....	18
II.2 Tinjauan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	26
II.3 Restrukturisasi Utang Dikaitkan Dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	50
II.4 Persaingan Antara Kepailitan Dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	55
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 61
III.1 Tipe dan Sifat Penelitian.....	61
III.2 Sumber Data.....	61
III.3 Pengumpulan dan Analisis Data.....	62
 BAB IV ANALISA KEWENANGAN KREDITOR DALAM KEPAILITAN DEBITOR.....	 63
IV.1 Kedudukan Debitor Dalam Perikatan Pada Umumnya Dengan Debitor Dalam Perikatan Utang – Piutang.....	63
IV.2 Insolven Pada Perseroan Terbatas Sebagai Dasar Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	70
IV.3 Penyusunan Konsep Perjanjian dan Rencana Restrukturisasi.....	77
IV.4 Pembuatan Perjanjian, Rencana Restrukturisasi dan Implementasinya.....	80
IV.5 Peran Mediasi Menangani Perjanjian-perjanjian Dalam Rangka Restrukturisasi...	84
 BAB V PENUTUP.....	 98
V.1 Kesimpulan.....	98
V.2 Saran.....	99
 DAFTAR PUSTAKA RIWAYAT HIDUP	